



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**KN Kembali, Pengusutan Dugaan Korupsi Dihentikan**

**BENGKULU** - Penyidik Polres Bengkulu memas-tikan menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu pada proyek sarana prasaranan Balai Budidaya Ikan Laut Payau (BBILP) tahun anggaran 2017 senilai Rp 345.796.000. Penghentian dilakukan setelah dilakukan gelar perkara ke Polda Bengkulu. Hasil penilaian, kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan kerugian negara sesuai dengan hasil audit yang dilakukan BPKP sejumlah Rp 92.421.840, semuanya telah dikembalikan DKP ke Unit Tipidkor Satreskrim Polres Bengkulu.

Kapolres Bengkulu AKBP. Pahala Simanjuntak, SIK melalui Kasat Reskrim AKP. Indramawan Kusuma Trisna, SIK membenarkan telah dilakukan penghentian penyelidikan. "Benar, sudah dihentikan, karena masih tahap penyelidikan dan KN sudah dikembalikan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui proyek menggunakan dana APBD Provinsi Bengkulu tahun 2017 sebesar Rp 345.796.000 itu diperuntukan membangun sarana dan prasarana BBILP yakni penampungan air laut yang akan dialirkan ke kolam-kolam pembudidayaan ikan laut payau. Proyek berada di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Dalam pelaksanaannya dana proyek telah dicairkan uang muka 30 persen atau senilai Rp 103.738.800. Di tengah perjalanan, kontraktor pelaksana CV Wijaya Persada tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Hingga akhirnya jadi temuan BPK maka dilakukan pengusutan oleh Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Bengkulu sejak akhir April 2018.

Adapun indikasi perbuatan melawan hukum yakni spesifikasi realisasi pekerjaan fisik tandon di lapangan tidak sesuai dengan spek yang tertuang dalam kontrak kerja. "Karena audit investigasi jadi hasil KN nya sudah dapat diketahui ketika masih dalam penyelidikan. Sebelum naik ke penyidikan sudah ada itikad baik dari pihak terkait melakukan pengembalian KN. Dengan demikian pengusutan kita hentikan," pungkas Indramawan.(cup)